

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bandar Lampung telah terus berkembang dari sisi jumlah penduduk, kewilayahan dan ekonomi. Perkembangan ini menuntut penyediaan sarana angkutan umum yang sesuai dengan kebutuhan kota. Standar pelayanan angkutan umum yang harus dipenuhi yaitu aman, cepat, lancar, nyaman, ekonomis dan ketersediannya terjamin.

Perkembangan kota merupakan konsekuensi dari banyaknya kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang disebut dengan kota. Kelengkapan infrastruktur menyebabkan arus pertambahan penduduk dari luar wilayah yang masuk ke dalam kota semakin banyak. Implikasinya munculnya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salahsatunya adalah adanya kebutuhan akan transportasi publik yang handal. Jika layanannya tidak handal maka masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh angkutan umum akan meninggalkan angkutan publik dan beralih ke kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Implikasi bagi kota jika masyarakatnya lebih mengutamakan penggunaan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum adalah meningkatnya biaya untuk memperlebar ruas jalan dan melakukan perbaikan-perbaikan badan jalan. Sementara kondisi kota akan terlihat semakin tidak tertata karena lalulintas yang padat dengan beragam cara mengendarai kendaraan, pelanggaran akan rambu lalulintas meningkat pesat dan pada akhirnya akan terjadi kerusakan lingkungan kota dari sisi udara, visual, dan suara.

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Seperti data yang didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandar Lampung dimana jumlah penduduk kota pada 2005

adalah 721.492 jiwa, maka lima tahun kemudian jumlahnya mengalami peningkatan pesat menjadi 854.453 jiwa (lihat Tabel 1.1.).

Pertambahan jumlah penduduk akan membawa implikasi pada penambahan jumlah perjalanan. Jika semua perjalanan tidak terfasilitasi dengan baik maka masyarakat akan cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Itulah sebabnya, angkutan umum harus dibangun secara efektif dan efisien juga mempertimbangkan kondisi daerah (ekonomi daerah) agar penentuan jenis angkutan umum tidak mempertimbangkan kelayakan ekonomi (karena nantinya pengaruhnya ke biaya perjalanan yang tidak tepat)

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Ekonomi Bandar Lampung

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2005	721.492	3,10
2006	769.881	3,54
2007	798.472	3,16
2008	822.880	3,42
2009	854.453	3,72

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 2010

Perekonomian kota telah cukup baik meskipun pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata nasional. Namun pertumbuhan positif ini menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat telah mengalami peningkatan. Jumlah penduduk meningkat, kegiatan meningkat, ekonomi meningkat dan pada akhirnya investasi juga meningkat. Hal ini harus diikuti oleh pelayanan yang baik yang salahsatunya pelayanan angkutan publik.

Selain itu, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal. Sehingga, bagi kota-kota yang masih belum mengembangkan angkutan umum massal perlu mewujudkan hal tersebut dengan mengubah kebijakan terkait dengan jenis alat angkut, penerapan jenjang trayek, mengubah pola perijinan, sistem penentuan tarif dan penarikan ongkos, dan

sebagainya. Sebab, persoalan utama transportasi angkutan umum di setiap kota bukan karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membangun angkutan massal, namun lebih disebabkan oleh tidak jelasnya regulasi angkutan umum. Jika regulasi jelas, maka swasta akan tertarik untuk mengembangkan angkutan massal sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah dan yang diharapkan oleh masyarakat.

1.2. Permasalahan

- Masyarakat Bandar Lampung banyak yang menilai angkutan umum tidak mampu melayani kebutuhan penumpang (*telaah isu di media massa*)
- Salahsatu buktinya adalah pertumbuhan jumlah kendaraan (pribadi) yang melonjak tajam
- Belum ada langkah strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah angkutan umum
- Jenis kendaraan tidak mempertimbangkan kapasitas angkut penumpang yang besar. Sehingga jumlah paratransit harus berjumlah banyak. Akan lain halnya jika menggunakan kendaraan dengan kapasitas angkut besar. Hingga saat ini pertimbangan jenis kendaraan berdasarkan pada lebar jalan
- Jumlah kendaraan tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga ada rute yang kosong namun ada juga rute yang terlalu banyak jumlah kendaraannya. Hingga saat ini masih belum ada perhitungan kebutuhan jumlah armada agar sesuai dengan permintaan (*demand*)
- Tarif angkutan umum tidak memperhatikan BOK (Biaya Operasional Kendaraan) yang optimal sebagai akibat dari tidak dikajinya jenis dan jumlah kendaraan secara komprehensif. Akibatnya BOK tidak seimbang dengan pemasukan, dan cara penyelesaiannya adalah dengan cara menaikkan tarif (penumpang membayar biaya perjalanan lebih besar).

Ada juga program Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang rentan terhadap keberlanjutan penggunaan angkutan umum di Kota Bandar Lampung yaitu:

- Program pengurangan jumlah angkutan kota mikrolet untuk diganti dengan bus, dengan pola 3:1 (tiga mikrolet diganti dengan satu bus). Program pengurangan mikrolet tidak serentak dengan pergantian bus sehingga terjadi pengurangan angkutan kota padahal jumlah penduduk kota yang “bergerak” semakin meningkat (terjadi pengurangan *supply* kapasitas angkut sementara *demand* meningkat). Akibat tidak terfasilitasi angkutan umum, kebutuhan tersebut dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang ijin memiliki dan pembeliannya mudah dan murah.
- Tarif mengikuti trend kapasitas terisi tempat duduk angkutan umum / *load factor* (dan bahan bakar minyak/BBM) namun tidak mempertimbangkan standar pelayanan. Pemerintah juga hanya bisa mengatur tarif tapi tidak berupaya mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan kapasitas terisi dari angkutan umum (misalnya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, penerapan pajak melintas ruas jalan tertentu, dan sebagainya).

Kebijakan terkait dengan tarif merupakan masalah nasional, bukan hanya masalah Kota Bandar Lampung. Namun pemerintah kota hingga saat ini memang masih belum mengambil kebijakan yang bisa berdampak pada peningkatan jumlah penumpang, sementara terkait dengan efeknya selalu dibahas dan dinegosiasikan dengan operator.

Untuk itulah kajian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan kesimpulan kebijakan apakah yang terkait dengan sistem angkutan umum yang sebaiknya diterapkan di Kota Bandar Lampung.

1.3. Maksud Dan Tujuan

- Maksud dari penelitian ini adalah melakukan kajian kebijakan angkutan umum di Kota Bandar Lampung terkait dengan pengaturan trayek, tarif, jenis dan jumlah armada, waktu operasi kendaraan, jadwal kedatangan dan keberangkatan (penjadwalan)
- Tujuannya mendapatkan gambaran kebijakan yang sesuai dengan Kota Bandar Lampung

1.4. Batasan Masalah

- Kajian dilakukan di Kota Bandar Lampung
- Kajian dilakukan terhadap kebijakan di sektor transportasi angkutan umum
- Hal yang dikaji adalah kebijakan yang terkait dengan pengaturan trayek, tarif, jenis dan jumlah armada, waktu operasi kendaraan, jadwal kedatangan dan keberangkatan (penjadwalan).
- Kajian ini juga akan melihat kebijakan angkutan umum perkotaan di negara lain yang dapat dijadikan contoh pengembangan angkutan umum di Kota Bandar Lampung